

Kekuasaan Kehakiman dan Pandangan Hukum Progresif: Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat

Nurhadiantomo

Dosen Magister Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Kecenderungan tatanan hukum tergantung dari perkembangan sistem politik. Artinya, sistem politik yang otoriter-represif akan menciptakan tatanan hukum yang represif pula; sistem politik yang demokratis-partisipatif akan membuahkan tatanan hukum yang otonom atau responsif. Kecenderungan tatanan hukum yang represif, otonom, dan responsif ini juga terjadi di negara negara developmentalis seperti Indonesia. Setelah era reformasi negara-bangsa ini mengalami proses belajar demokrasi yang disebut sebagai demokratisasi dalam berbagai kehidupan bernegara-bangsa (Lihat: Nurhadiantomo, 2003). Perubahan yang memperkuat kemandirian kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim tersebut merupakan perubahan struktural, yang dapat menjadimodal awal dalam pengembangan kultural, yaitu peningkatan karakter budaya hukum dalam lembaga peradilan kita. Karena hakim secara fungsional merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dan melalui pengembangan wawasan dan pendidikan karakter hakim berkaitan dengan makna serta tujuan hukum, yang pada gilirannya akan mewujudkan budaya hukum dengan kualitas yang memadai. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 32 UU Nomor 4 Tahun 2004). Profesional dan berpengalaman di bidang hukum, merupakan persyaratan intelektual yang harus dipenuhi. Tetapi ada persyaratan lain yang lebih mendasar, yaitu integritas kepribadian yang tinggi atau kejujuran (*istiqomah*), jika sikap, tindakan, dan aktivitasnya dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari dilandasi sebagai *ibadah*.

Kata kunci: *kekuasaan kehakiman, keadilan hukum*

I. PENDAHULUAN

Kecenderungan tatanan hukum tergantung dari perkembangan sistem politik. Artinya, sistem politik yang otoriter-represif akan menciptakan tatanan hukum yang represif pula; sistem politik yang demokratis-partisipatif akan membuahkan tatanan hukum yang otonom atau responsif. Kecenderungan tatanan hukum yang represif, otonom, dan responsif ini meminjam konsep Nonet dan Selanick (1978) untuk perkembangan hukum negara termasuk negara developmentalis seperti Indonesia. Setelah era reformasi negara-bangsa ini mengalami proses

belajar demokrasi yang disebut sebagai demokratisasi dalam berbagai kehidupan bernegara-bangsa (Lihat: Nurhadiantomo, 2003).

Demokratisasi dalam kehidupan bernegara-bangsa tersebut, antara lain dapat dilihat pada susunan kekuasaan negara setelah perubahan UUD 1945, yang menampilkan perubahan yang sangat fundamental. MPR berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi *joint session* antara DPR dan DPD. DPA dihapus karena dilihat fungsinya tidak lagi strategis. DPR dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang BPK ditambah. Selain itu, UUD 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum dan Bank Indonesia (Sutiyoso dan Puspitasari, 2005:25).

Kekuasaan kehakiman setelah UUD 1945 diubah, tetap menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara Republik Indonesia yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain di bawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Untuk menjaring hakim-hakim agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga-lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon hakim agung, yaitu Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945) (Sutiyoso dan Puspitasari, 2005:26).

Sistem politik yang demokratis telah membawa peluang tumbuhnya tatanan hukum yang otonom, yang pada gilirannya juga berkembangnya tatanan hukum yang responsif, yang dimulai dengan kemandirian kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim. Kebebasan hakim di sini kebebasan untuk mencari dan menemukan keadilan yang substansial.

II. TATANAN HUKUM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Sebagaimana telah disinggung di depan, terdapat tiga tipe tatanan hukum, yaitu tatanan hukum hukum represif, tatanan hukum otonom, dan tatanan hukum responsif, yang masing-masing memiliki karakteristik

sendiri. Tatahan hukum represif mendahului dua tatahan hukum yang lain, diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan fundamental untuk membangun sistem politik yang kuat sebagai prasyarat untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi (lihat: Nonet dan Selznick, 1978:14-15). Hukum telah menghamba pada kekuasaan yang represif, dan perintah dari pengemban kekuasaan memiliki kewenangan tanpa batas. Hukum dan negara serta hukum dan politik tidak terpisah, sehingga aspek instrumental dari hukum lebih dominan dibanding aspek ekspresifnya. Karena kekuasaan politik memiliki akses langsung pada institusi hukum, sehingga tatahan hukum praktis menjadi identik dengan negara, dan hukum disubordinasi pada "raison d'etat". Karena tujuan hukum adalah ketertiban sosial, sehingga keadilan yang mengacu pada ketertiban dan ketahanan sosial (Nonet dan Selznick, 1978:29-33).

Dalam tatahan hukum otonom, hukum dipandang sebagai institusi yang mandiri, yang mampu mengendalikan represi dan melindungi integritasnya sendiri. Tatahan hukum ini berintikan "rule of law"; mengkoordinasi putusan pejabat hukum, integritas hukum, dan dalam kerangka itu institusi hukum serta cara berpikir mandiri memiliki batas-batas yang jelas. Hukum terpisah dari politik, yang memiliki implikasi terhadap kewenangan kehakiman yang luas, serta adanya separasi fungsi legislatif dan fungsi yudisial. Tatahan hukum itu mengacu "model aturan", dan aturan-aturan itu dapat membatasi peresapan hukum ke dalam wilayah politik, serta membatasi kreativitas institusi-institusi hukum. Dari sinilah prosedur dipandang sebagai inti hukum, yang karena itu tujuan pertama dan kompetensi utama hukum adalah regulitas dan kelayakan. Loyalitas hukum mengharuskan kepatuhan semua pihak pada aturan hukum positif, dan kritik terhadap aturan hukum positif harus dilaksanakan melalui proses politik. Karena tujuan hukum adalah legitimasi, maka keadilan yang tampil adalah keadilan prosedural (Nonet dan Selznick, 1978:53-54).

Dalam tatahan hukum responsif, hukum dipandang sebagai fasilitator atau sarana tanggapan terhadap aspirasi sosial sebagai kebutuhan masyarakat. Pandangan ini mengimplikasikan dua hal; pertama, hukum harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional; kedua, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang tengah berjalan. Hal ini berarti bahwa tujuan berfungsi sebagai norma kritik, dan dengan demikian mengendalikan risiko "*institutional surrender*". Dalam tipe ini, aspek ekspresif dari hukum lebih menonjol dibandingkan dengan dua tipe lainnya.

Dalam tatatan hukum ini, tujuan hukum adalah kompetensi dan keadilan yang tampil adalah keadilan substantif atau lebih menonjol dibandingkan keadilan prosedural (Nonet dan Selznick, 1978:73-76).

Dalam realitasnya, tiap tatanan hukum mempunyai sifat campuran yang mengandung unsur-unsur tiga tipe atau model tersebut. Dalam suatu negara pada kurun waktu tertentu, pada umumnya terdapat kecenderungan pada salah satu tipe yang paling dominan, walaupun unsur-unsur dari tipe tatanan hukum yang lain juga menyertainya. Di Indonesia, pada masa Orde Baru misalnya, dengan sistem politik yang cenderung otoriter-represif, yang membawa kecenderungan tampilnya tatanan hukum represif, unsur-unsur hukum yang bersifat otonom seringkali muncul, dan unsur-unsur yang bersifat represif kadang-kadang juga terlihat. Di era reformasi, yang disertai dengan demokratisasi sistem politik, mulai meninggalkan tatanan hukum represif, dan memunculkan kecenderungan pada tatanan hukum otonom. Meski demikian, baik unsur-unsur hukum represif maupun unsur-unsur hukum responsif kadang-kadang tampil pada era reformasi ini.

Munculnya tatanan hukum otonom di era reformasi antara lain terlihat, pertama, kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah amandemen tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain, serta terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua, pernyataan dari sejumlah pejabat peradilan di media massa dengan jargon "...sudah sesuai dengan prosedur...". Ungkapan yang demikian memang tidak salah, tetapi baru terkait dengan penegakan hukum yang bersifat prosedural dan formalistis, dan belum sampai pada tahap yang lebih esensial dan substansial.

Perubahan yang memperkuat kemandirian kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim tersebut merupakan perubahan struktural, yang dapat menjadimodal awal dalam pengembangan kultural, yaitu peningkatan karakter budaya hukum dalam lembaga peradilan kita. Karena hakim secara fungsional merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dan melalui pengembangan wawasan dan pendidikan karakter hakim berkaitan dengan makna serta tujuan hukum, yang pada gilirannya akan mewujudkan budaya hukum dengan kualitas yang memadai.

Busyro Muqodas pernah menyoroti kualitas putusan hakim yang kurang dipertimbangkan dengan baik, sehingga putusan hakim sering kurang memenuhi perasaan keadilan masyarakat. Padahal suatu putusan harus memuat aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hilangnya salah satu aspek tersebut, terutama aspek filosofis dan sosiologis menjadikan suatu putusan menjadi kurang lengkap, meskipun secara formal dapat dibenarkan (Sutiyoso dan Puspitasari, 2005:93). Secara lebih luas, peringatan Mahatma Gandhi yang disebut dengan "*the seven social sins*", yaitu: "*politics without principles; commerce without morality; wealth without work; education without character; science without humanity; pleasure without conscience; and workship without sacrifice*", yang dapat kita renungkan bersama berkaitan dengan keberadaan hukum serta peranan hakim dalam memahami, menghayati, menegakkan dan menemukan hukum.

III. HUKUM PROGRESIF

Pemikiran hukum progresif ini dikembangkan oleh Profesor Satjipto Rahardjo yang selanjutnya memperoleh tanggapan dan dikembangkan oleh murid-muridnya. Pemikiran itu bertolak dari asumsi dasar, bahwa obyek yang bernama hukum itu menjadi begitu luas, karena ia bersentuhan dengan sejumlah sangat besar aspek kehidupan manusia, sebut saja: manusia sendiri, masyarakat, negara, politik, sosial, ekonomi, sejarah, psikologi, filsafat, budaya, manajemen, biologi, religi. Hukum itu akan bertemu dengan aspek-aspek tersebut di atas. Bertemu dalam arti berinteraksi, berkorespondensi, dibatasi (*confined/determined*), tetapi juga membatasi, mengontrol sekalian faktor tersebut. Pertemuan dengan sekalian aspek tersebut sekaligus juga mendefinisikan apa hukum itu, fungsi, peran dan tempatnya dalam masyarakat (Rahardjo, 2004).

Berangkat dari pemahaman yang demikian itu, maka tak dapat dibendung kehadiran dari bermacam-macam ancangan (*approach*), optik, disiplin, subdisiplin, metodologi, aliran, dan sebagainya. Dihadapkan pada perubahan-perubahan, maka kita juga bisa berbicara mengenai "medan ilmu yang selalu bergeser" (*changing frontier of legal science*). Dari ini kita layak juga berbicara mengenai batas-batas yang cair (*fluid*). Maka kita pun berbicara mengenai ilmu hukum yang berbeda-beda di berbagai abad. Misalnya, ilmu hukum abad ke sembilan belas berbeda dengan abad ke dua puluh satu (Rahardjo, 2004). Dalam ilmu sosial dan humaniora,

termasuk ilmu hukum, setiap terjadi perubahan ataupun pergeseran, di samping terjadi unsur-unsur yang berubah, tentunya juga terdapat unsur-unsur yang berkelanjutan.

Antara ilmu hukum praktis dengan ilmu hukum progresif, perbedaannya terletak pada penggunaan paradigma, ilmu hukum praktis menggunakan paradigma "rule", sedang ilmu hukum progresif memakai paradigma manusia (*people*). Penerimaan paradigma manusia tersebut membawa ilmu hukum progresif untuk memedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*). Dalam bahasa Holmes, logika peraturan disempurnakan dengan logika pengalaman. Bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, sedangkan pada ilmu hukum praktis, manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum (Rahardjo, 2004). Yang dimaksud dengan ilmu hukum praktis tersebut, boleh jadi ilmu hukum yang diterapkan dalam praktek hukum yang dipengaruhi oleh positivisme hukum, yang ingin memisahkan hukum (dalam arti *rule*) dengan unsur-unsur bukan yuridis seperti moral, etika, sosiologis dan historis. Tetapi ilmu hukum praktis yang telah dipengaruhi dan dijiwai oleh ilmu hukum progresif seperti yang dimaksud, persoalannya menjadi lain, karena hukum merupakan paduan antara nilai-nilai dan norma-norma (Arief, 1994).

Di sini kita bisa menambahkan bahwa karakteristik ilmu hukum progresif sebagai ilmu yang visioner. Ini juga berkaitan dengan asas besar dalam ilmu hukum progresif yang berpendapat bahwa "hukum adalah untuk manusia" (Rahardjo, 2004). Asas besar ini, selanjutnya berkembang menjadi doktrin. Jika ditarik ke jenjang hukum, doktrin yang demikian bersumber dan merupakan pengembangan dari Pancasila sebagai dasar falsafah negara, dan Pancasila tersebut dapat dijadikan sebagai acuan parameter bagi penerapan "*margin of appreciation*" (Muladi, 2004). Ilmu hukum progresif menjadikan moral dan akal budi sebagai paradigma (Rahardjo, 1997). Paradigma moral dan akal budi juga bersumber dari Pancasila sebagai dasar falsafah negara.

Beranjak dari apa yang dinyatakan oleh Gijsels dan Hoecke bahwa telah terjadi "perubahan yang berbalik oleh peradilan", peradilan-peradilan tersebut telah mengabaikan penggunaan IQ yang linier, marjinal dan matematis yang selama ini menjadi pegangan, beralih ke penggunaan SQ yang berseberangan. Zohar dan Marshall menamakan berpikir dengan menggunakan IQ sebagai "*rational, logical, rule-bound thinking*", sedangkan SQ sebagai "*creative, insightfull, rule-making, rule-breaking*"

tinking" (Zohar dan Marshall, 2000). Ilmu hukum progresif yang visioner dan membebaskan sudah tentu berpihak kepada penggunaan SQ dalam menjalankan hukum. Untuk lebih lengkap, ilmu hukum progresif menggunakan baik IQ, EQ, maupun SQ sesuai dengan urgensi masalah (Rahardjo, 30 Desember 2002; 7 Oktober 2004).

Zohar dan Marshall mendefinisikan kecerdasan spiritual (SQ) sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna (value), yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup serta kehidupan manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan dan jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. SQ merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif, bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi (Zohar dan Marshall, 2000). Sementara, menurut Agustin, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna aktivitas hidup (*ibadah*) dalam setiap perilaku dan kegiatan yang dilakukan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat *fitrah*, menuju manusia yang seutuhnya (hanif) dan memiliki pola pemikiran yang integralistik (*tauhid*), serta prinsip "hanya karena Allah". (Agustin, 2004:57).

Hukum progresif amat peduli dengan perburuan kebenaran, dan menghendaki sejauh mungkin menampilkan gambar yang utuh. Hukum dipahami tidak hanya berupa keteraturan (*order*), tetapi juga ketidakteraturan (*disorder*). Di samping itu, perlu terbuka terhadap realitas chaotic yang ada pada hukum, karena memang keadaan seperti itu bisa ditemukan dalam hukum (Stamford, 1989; Rahardjo, 2004). Tujuan hukum progresif adalah pembebasan, pencarian kebenaran dan keadilan, di samping kepastian hukum, lebih menekankan substansialisme daripada formalisme.

IV. TUGAS HAKIM

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang operasionalisasinya dilakukan oleh lembaga peradilan, perlu memperhatikan asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman/peradilan yang baik. Asas hukum merupakan pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang kongkrit (hukum positif) (Mertokusumo, 1985:32). Sementara itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, ialah rasio logisnya (Rahardjo, 1986:85). Asas hukum itu dapat ditemukan dan disimpulkan

langsung ataupun tidak langsung dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan (Syahrani, 1991:138).

Asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang baik di antaranya meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Asas kebebasan hakim;
 - b. Hakim bersikap menunggu;
 - c. Pemeriksaan berlangsung terbuka;
 - d. Hakim aktif;
 - e. Asas bersikap pasif (*tut wuri*);
 - f. Asas kesamaan (*audi et alterim partem*);
 - g. Asas obyektivitas;
 - h. Putusan disertai alasan (*motiverings plicht*);
- (Sutiyoso dan Puspitasari, 2005:66).

Asas kebebasan hakim tersebut dijamin dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 yang menegaskan: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, hakim sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas dari campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstern, sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya (Affandi, 1981:13). Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent judiciary*) menjadi ideologi yang universal masa kini dan masa mendatang (Harahap, 1997:31). Tetapi kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah bersifat mutlak. Secara mikro, hakim dibatasi Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan perilaku atau kepentingan para pihak. Begitu pula secara makro, hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya (Mertokusumo, 1999).

Beberapa tugas hakim sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, antara lain:

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), di antaranya adalah:
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

- b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1).
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2).
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat 1).
2. Tugas yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (Pasal 27).
 3. Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1).

Hakim dalam mengadili suatu perkara melalui tiga tahapan; pertama, yaitu mengkonstatir (mengkonstalisasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya peristiwa kongkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Kedua, mengkualifisir (mengkualifikasikan), yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi termasuk dalam hubungan seperti apa, atau menentukan dan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Ketiga, mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premisse mayor* (peraturan hukumnya) dan *premisse minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional, yaitu: keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya (Sutiyoso dan Puspitasari, 2005:126-127).

Sebagaimana telah disebutkan di depan, bahwa obyek yang bernama hukum itu menjadi begitu luas, karena bersentuhan dengan sejumlah aspek kehidupan manusia yang sangat besar dan luas. Karena itu, tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia yang sangat luas, baik jenis maupun jumlahnya. Karena itu, hakim juga harus dapat menemukan hukum dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi

peraturan perundang-undangan. Walaupun penemuan hukum (*rechtafinding*) tidak hanya tugas dari hakim, tetapi juga pembentuk undang-undang dan peneliti hukum. Sumber utama penemuan hukum itu adalah:

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum kebiasaan;
- c. Jurisprudensi;
- d. Perjanjian internalisasi; dan;
- e. Doktrin.

Proses penemuan tersebut melalui sistem, metode, dan prosedur yang telah ada.

V. HAKIM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT

Ada beberapa konsep tentang keadilan, yang antara lain diketengahkan Aristoteles tentang keadilan komulatif (*commutative justice*) yaitu pertukaran kebaikan (nilai-nilai, keuntungan), yang dapat diterima dan tidak terpaksa dikontraskan dengan manipulasi, eksploitasi yang berlebihan dan tidak diinginkan. Aristoteles juga menengahkan keadilan distributif (*distributive justice*), yaitu proporsi yang layak dan ditentukan secara obyektif oleh rasio, seperti antara perbuatan seseorang dengan imbalannya, dan antara status (kemampuan, kinerja) seseorang dengan imbalannya. Ada pula keadilan korektif/rehabilitatif (*corrective/rehabilitative justice*), yaitu keadilan yang tujuannya bukan penghukuman demi hukum itu sendiri atau balas dendam, tetapi untuk merubah karakter dan lingkungan si pelanggar, sehingga perbuatan yang sama tidak akan pernah dilakukan lagi. Selain itu ada juga keadilan retributif (*retributive justice*), yaitu keadilan yang tujuan utamanya adalah balas dendam atau dan/atau tidak mau memaafkan suatu kejahatan. Ada lagi keadilan vindicativa yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagian sesuai dengan daya kreativitasnya dalam bidang kebudayaan masyarakat. Suatu ketika, ada keadilan yang menuntut ketaatan terhadap undang-undang disebut keadilan legalitis dan seterusnya (lihat Rahardjo, 1991).

Sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa disebutkan pada UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat 1: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam penjelasan Pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan

hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Hukum yang antara lain dapat diartikan sebagai paduan norma-norma dan nilai-nilai, norma-norma itu bersifat obyektif dan nilai-nilai itu bersifat subyektif atau intersubyektif. Nilai-nilai itu sebagai sesuatu yang dianggap berguna bagi masyarakat yang berada di balik norma. Nilai-nilai itu bersifat subyektif menjadi intersubyektif, karena dipahami dan dihayati oleh sejumlah orang ataupun masyarakat luas. Begitu pula, rasa keadilan masyarakat, juga bersifat intersubyektif. Hakim dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat, jika hakim tersebut dapat mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Hakim dapat memahami rasa keadilan yang ada dalam aspirasi masyarakat, jika ia memiliki empati yang tinggi terhadap masyarakat, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh masyarakat berkaitan dengan keadilan hukum. Sikap empati yang tinggi untuk memahami rasa keadilan masyarakat diperlukan kecerdasan spiritual.

Pada Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan: Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Menurut Bismar Siregar, kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", bila dihayati merupakan doa dan janji antara hakim dengan Tuhan yang kurang lebih berbunyi: "Ya Tuhan, atas nama-Mu saya putuskan tentang keadilan ini". Salah satu syarat penting untuk diangkat menjadi seorang hakim agung adalah "bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa". (UU Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 27, ayat 1 b). Sumpah seorang hakim sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 tahun 2004 Pasal 30 ayat 1 adalah: "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya....".

Doa dan janji antara manusia yang menyandang jabatan hakim dengan Tuhannya, bukan persoalan ringan, karena dapat berakibat secara langsung dan tidak langsung pada yang bersangkutan, serta akibat yang lebih luas lagi yaitu para pihak yang bersangkutan dan pada gilirannya juga pada negara dan bangsanya. Bagi hakim yang beragama Islam, doa dan janji tersebut hanya dengan *aqidah* yang memadai, yang tercermin dalam sikap dan tingkah laku *akhlaqul karimah* (akhlak mulia) yang oleh Pakoebuwana IV disebut "*jatmika ing budhi*" yaitu berbudi luhur (berakhlak mulia) karena ketaatannya kepada Allah SWT dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari.

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 32 UU Nomor 4 Tahun 2004). Profesional dan berpengalaman di bidang hukum, merupakan persyaratan intelektual yang harus dipenuhi. Tetapi ada persyaratan lain yang lebih mendasar, yaitu integritas kepribadian yang tinggi atau kejujuran (*istiqomah*), jika sikap, tindakan, dan aktivitasnya dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari dilandasi sebagai *ibadah*. Hakim adalah wakil (wali) Allah di muka bumi (*fil ardi*), ia menjalankan tugas atas nama dan karena Allah SWT, *la ilaha illallah*, dan apa yang dilakukan agar turut serta memberikan *rahmatan lil alamin*. Melalui pola pemikiran yang *tauhidi* dan prinsip "hanya karena Allah", sikap dan pemikiran yang bersifat *fitrah*, menuju manusia yang seutuhnya (*hanif*).

Sistem hukum merupakan salah satu penyangga sistem nasional atau sistem sosial yang stabil-dinamis. Perubahan struktural yang berefek terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman, tentunya harus dibarengi dengan perubahan kultural, yang bertumpu pada watak, sikap, dan tingkahlaku hakim seperti tersebut di atas. Tanpa perubahan kultural, yang terjadi hanya involusi pemikiran dan perwujudan hukum, bahkan jika meminjam analogi Mahatma Gandhi, yang muncul adalah "hukum yang miskin moral dan etika". Hukum mestinya tidak hanya dipahami sebagai "aturan-aturan dan logika, tetapi juga struktur dan kultur sosial sosial termasuk sikap, tindakan, dan pengalaman". Melalui pengembangan kecerdasan spiritual dalam kehidupan hakim, yang dapat menjaga dan menumbuhkembangkan karakter dan perilaku sesuai dengan keberadaannya, akan dapat menumbuhkembangkan budaya hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat responsif, yang mampu melahirkan keadilan substansial sebagai modal kultural, dalam proses pengembangan sistem sosial yang tangguh dan stabil-dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Wahyu. 1981. *Hukum dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni

Agustin, Ary Ginandjar. 2004. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual: ESQ, Emotional Spiritual Quotient*. Jakarta: Arga

Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

_____. 1994. "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia". *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 24 Juni 1994

Mertokusumo, Sudigno. 1985. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty

_____. 1998. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Muladi. 2004. "Menggali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia". Makalah pada Seminar Nasional *Menggagas Ilmu Hukum (Progresif) Indonesia* kerjasama IAIN Walisongo – Ikatan Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 8 Desember 2004.

Nonet, Phillipe & Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Law

Nurhadiantomo. 2003. *Hukum Reintegrasi Sosial: Konflik-konflik Sosial "Pri – Nonpri" & Hukum Keadilan Sosial*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti

_____. 1997. "Negara Hukum dan Deregulasi Moral". *Kompas*, 13 Agustus 1997

_____. 2004. "Hukum Progresif sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia". Makalah pada Seminar Nasional *Menggagas Ilmu Hukum (Progresif) Indonesia* kerjasama IAIN Walisongo – Ikatan Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 8 Desember 2004

Samford, Charles. 1989. *The Disorder Law: A Critique of Legal Theory*. New York: Basil Blackwell Ltd.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press

Syahrani, Ridwan. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu

Zohar, Donah & Ian Marshall. 2000. *SQ-Spiritual Quotient, The Ultimate Intelligence*. London: Bloomsbury

Undang-undang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung